

# **PERAN UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP) DALAM MEWUJUDKAN MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs) 2015**

Suwarti Sari

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Jenderal Achmad Yani Jl. Terusan Jenderal  
Sudirman, PO.BOX 148 Cimahi

*Email: Suwartisari73@gmail.com*

## ***Abstrak***

*UNDPAs an international organization, and as part of the UN has an important role for its member states. It is proved by some of their efforts in helping any country that is still behind in achieving the MDGs both at national and global level. The MDGs were agreed by the leaders in 2000 and set to be achieved by 2015. The core of this millennium declaration is 8 Millennium Development Goals. If the MDGs achieved, world poverty will be cut, and billions more people will have the opportunity to benefit from the global economy. In the implementation of the achievement of the MDGs, UNDP encountered some obstacles and constraints encountered of which there are few countries in the world especially the poor and developing countries that did not experience a significant progress with the MDGs.*

*Keywords: International Organizations, UNDP, MDGs*

## ***Abstract***

*UNDP Sebagai sebuah organisasi internasional dan sebagai bagian dari jaringan PBB memiliki peranan yang sangat penting bagi negara-negara anggotanya. Hal ini dibuktikan dengan beberapa upaya mereka dalam membantu setiap negara yang masih ketinggalan dalam mewujudkan MDGs baik di tingkat nasional maupun global. MDGs adalah kesepakatan para pemimpin dunia pada tahun 2000 dan ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2015. Inti dari deklarasi millennium ini adalah 8 tujuan pembangunan millennium. Jika tujuan MDGs ini tercapai, kemiskinan dunia akan terpengkas, dan miliaran orang akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari ekonomi global. Dalam pelaksanaan upaya pencapaian MDGs, UNDP mengalami beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi. diantaranya masih ada beberapa negara di dunia khususnya negara miskin dan berkembang yang tidak mengalami kemajuan signifikan dengan adanya MDGs ini.*

*Kata Kunci: Organisasi Internasional, UNDP, MDGs*

## **1. Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang**

Komunitas internasional bagaimanapun memiliki peran sangat penting dalam mendorong, inovasi, partisipasi dan *good governance* terutama di Indonesia. Komunitas internasional

antara lain lembaga keuangan dan donor, lembaga internasional dibawah *United Nations* (UN), NGO internasional, dan institusi internasional lain seperti internasional *city county management association* (ICMA). Dikurung waktu 1998-2002 tidak kurang 11 lembaga donor internasional penting yang memiliki program besar berkaitan dengan isu-isu

partisipasi dan *good governance* di Indonesia selain World Bank dan ADB, dapat disebutkan UNDP, USAID, termasuk dalamnya CSSP dan NRM—GTZ, CIDA, JICA, DFID, *British council*, *Ford Foundation*, dan *TIFA Foundation*, NGO Internasional yang memiliki program partisipasi dan *good governance* yang cukup penting di Indonesia adalah NDI, PACT, CARE dan *the Asia Foundation* (TAF).

*Good governance*, diakui lembaga donor merupakan aspek penting menuju pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan, oleh sebab itu berbagai kegiatan pembangunan kapasitas negara-negara penerima bantuan untuk memperbaiki kualitas *governance*, merupakan bagian penting dari hampir semua program lembaga donor. Dalam salah satu laporannya yang sangat berpengaruh, Bank Dunia menyatakan bahwa pemerintah adalah sentral dalam pembangunan ekonomi sosial, tidak sebagai penyedia langsung pembangunan, tetapi sebagai partner, katalis, dan fasilitator (World Bank, 1997). Tema *good governance* menjadi sangat penting dalam kerjasama pembangunan internasional di era – 1990-an sebagai respon atas kenyataan bahwa sistem kebijakan dan administrasi yang buruk di negara-negara berkembang adalah kendala utama menuju pembangunan berkelanjutan. Hal ini didukung oleh rangkaian studi Bank Dunia yang mencoba menjelaskan faktor-faktor penyebab adanya perbedaan besar kinerja pertumbuhan antar negara-negara berkembang. Dengan dasar temuan ini, bank dunia berpendapat bahwa pemerintah harus menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan sektor swasta dan memperbaiki sistem investasi publik dalam pembangunan, sebelum pengurangan kemiskinan bisa terjadi.

Walaupun berbagai lembaga internasional memiliki definisi masing-masing tentang *good governance*, namun

upaya untuk memperdalam pemikiran tentang prinsip-prinsip dasar *good governance* terus menerus dilakukan, terutama agar ide ini dapat diadaptasi oleh kondisi lokal dan menghindari resiko sulitnya menjalankan reformasi menuju *good governance* yang terlalu kompleks. Saat ini mulai terbangun kesepakatan-kesepakatan tidak resmi tentang elemen esensial dari *good governance*, yaitu : Adanya kapasitas dalam pemerintahan untuk membuat kebijakan yang tepat serta adanya administrasi publik yang efisien dan akuntabel untuk menjalankannya, demokratisasi dan pembangunan partisipatori dengan mendorong keterlibatan yang lebih besar dari semua stake holder, penghargaan terhadap hak asasi manusia dan penegakan hukum. Elemen-elemen tersebut telah menjadi kerangka kerja dari berbagai upaya mewujudkan pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan dan itu berarti pula pengurangan kemiskinan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

## 1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Peran United Nations Development Programme (UNDP) mewujudkan Millenium Development Goals 2015 (MDG's 2015) ?

## 2. Kajian Pustaka

### 2.1 Peranan Organisasi Internasional

Organisasi Internasional merupakan pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda.

Organisasi internasional diakui keberadaannya hampir oleh setiap negara karena keberhasilannya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh negara. Organisasi internasional bahkan mampu mempengaruhi kebijakan suatu negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Keberadaan Organisasi Internasional sebagai aktor dalam hubungan internasional dapat disejajarkan dengan negara. Keberadaan organisasi internasional tersebut terkait dengan keinginan negara-negara maupun individu dan kelompok individu untuk saling bekerjasama dalam bidang tertentu. Terlebih dengan perkembangan serta kompleksitas isu yang diangkat dalam politik internasional membawa Organisasi Internasional semakin menunjukkan perannya sesuai dengan fungsi serta fokus dari Organisasi tersebut tersebut.

Organisasi internasional dalam analisis peran dapat dibagi tiga peran, yaitu:<sup>1</sup>

1. Sebagai problem solver, yaitu untuk menyelesaikan masalah-masalah internasional yang ada atau dengan kata lain untuk mencari jalan keluar atas segala masalah yang terjadi.
2. Perannya terhadap diri sendiri atau organisasi internasional itu sendiri, hal yang juga mempengaruhi adalah dampak segala aktivitasnya bagi keberadaan organisasi tersebut.
3. Organisasi internasional sebagai sumber peraturan terhadap

tindakan-tindakan kolektif. Dalam hal ini, organisasi tersebut dapat membuat aturan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Ada jenis peran sesuai dengan tujuannya seperti konsep peran dalam pemimpin regional seperti ini berhubungan dengan kewajiban atau tanggung jawab khusus suatu negara yang merasa terpanggil untuk berperan sebagai pemimpin dalam hubungannya dengan negara tetangga di sekitarnya dalam suatu kawasan.<sup>2</sup>

Ada jenis peran sebagai mediator integrator yaitu sejumlah pemerintahan menganggap negaranya mampu atau bertanggung jawab menyelesaikan, atau memikul tanggung jawab khusus untuk melakukan mediasi dalam menyelesaikan atau mendamaikan konflik negara lain. Mereka memandang negaranya sebagai “tukang” dalam menyelesaikan masalah regional atau global.<sup>3</sup>

Peranan yang dimainkan oleh seseorang atau institusi / organisasi dapat saja digelar melalui peran yang sejenis pada karakteristik. Menurut George Scott, peran yang dilakukan oleh suatu kelompok, badan, atau organisasi yang bernaung di bawah negara atau pemerintah atau publik dapat diwujudkan melalui perannya dalam **aspek inventarisasi** sebagai suatu bentuk pendataan dan analisa, **koordinasi** sebagai suatu bentuk sinergi dari berbagai unsur, **regulasi** dalam hal menyusun yurisdiksi yang mencakup kebijakan dan strategi, dan **evaluasi** yang meliputi setiap usaha untuk melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan untuk dapat mengetahui kekurangan maupun kelebihan

<sup>1</sup> Clive Archer, *International organization*, George Allen and Unwin, London, 1983. Hlm.34-35

<sup>2</sup> K.J Holsti. *Politik Internasional Suatu Kerangka Pemikiran Analisis*. Hlm 160

<sup>3</sup> Ibid. Hlm.162

sebagai bahan untuk pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan berikutnya<sup>4</sup>.

## 2.2 United Nations Development Programme (UNDP)

UNDP adalah jaringan pembangunan global PBB, sebuah organisasi advokasi untuk perubahan dan menghubungkan negara-negara ke pengetahuan, pengalaman dan sumber daya untuk membantu masyarakat membangun kehidupan yang lebih baik. UNDP berada di 166 negara, untuk membantu dan memberikan solusi dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional dan global. UNDP didedikasikan untuk agenda reformasi PBB, bekerja sama dengan semua badan-badan PBB untuk mempromosikan Deklarasi Milenium PBB dan mencapai Tujuan Pembangunan Milenium, agenda pertama yang umum di dunia adalah untuk pembangunan manusia.

Di Indonesia, UNDP bekerja untuk memajukan pembangunan manusia; memerangi kemiskinan dan kesenjangan; mengkonsolidasikan pemerintahan yang demokratis, dukungan pencegahan krisis nasional dan tingkat lokal; dan pemulihan; dan meningkatkan pembangunan lingkungan yang cerdas. UNDP juga terlibat penuh dalam memerangi HIV dan AIDS dan promosi kesetaraan gender.

UNDP Indonesia didedikasikan untuk lima komitmen *Deklarasi Paris tentang Efektifitas Bantuan*, didukung oleh 117 negara-negara donor, termasuk Indonesia, yaitu:

1. Kepemilikan nasional;
2. Keselarasan dengan prioritas nasional;
3. Harmonisasi donor;
4. Pengelolaan untuk hasil, dan
5. Saling akuntabilitas.

Pekerjaan UNDP di Indonesia merupakan bagian integral dari *United Nations Development Assistance Framework for Indonesia* (2006-2010) dan diatur oleh Program Negara UNDP periode yang sama, ditandatangani dengan Pemerintah Indonesia pada tahun 2005. Di Indonesia, UNDP bekerja di beberapa bidang prioritas:

1. Pengurangan Kemiskinan dan *Millenium Development Goals*. UNDP bekerja untuk mendukung Indonesia memerangi melawan kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mengurangi kesenjangan antara kelompok dan daerah, dan membantu mencapai delapan Tujuan Pembangunan Milenium tahun 2015 di seluruh negeri. Dalam konteks ini, UNDP telah mengidentifikasi lima bidang kunci
2. Pemerintah demokratis, dukungan UNDP terhadap konsolidasi demokrasi di Indonesia termasuk nasihat kebijakan dan bantuan teknis, penguatan kapasitas lembaga, mempromosikan dan dialog brokering, dan terlibat dalam jaringan pengetahuan dan berbagi praktek-praktek yang baik. Tiga bidang prioritas:
  - a. Mempromosikan 'pendalaman demokrasi melalui pemilu dan memperkuat dukungan parlemen;
  - b. mendukung desentralisasi dan reformasi tata pemerintahan lokal, dan
  - c. mempromosikan akses berbasis hak asasi manusia hukum dan reformasi sektor keadilan, dengan tujuan untuk meningkatkan terhadap keadilan bagi orang miskin dan kelompok rentan.
3. Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan, UNDP terlibat dalam proyek seri untuk memastikan bahwa langkah-langkah penting untuk memastikan

---

<sup>4</sup> George Scott, *Role Theory in the Social Sciences*, London, Sage Publication, 2005, hal. 37 – 40.

bahwasumberdayaalamdikelolasecaraefektifuntukmendukungpertumbuhanekonomi yang sehatdanpembangunanberkelanjutan. Bermitra dengan badan-badan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta, UNDP bertujuan untuk terus mengintegrasikan pertimbangan lingkungan strategis dalam perumusan kebijakan dan proses perencanaan yang dikombinasikan dengan peningkatan kapasitas yang efektif untuk mendukung pelaksanaan yang memberikan dampak signifikan terhadap tanah. Tiga kunci bidang fokus UNDP:

- a. Tingkat nasional aksi adaptasi perubahan iklim, dengan fokus pada analisis, saran kebijakan dan perencanaan strategis;
  - b. Aksi di tingkat masyarakat untuk pengelolaan yang lebih baik dari lingkungan, dengan fokus pada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui perlindungan kehutanan, meningkatkan manajemen lingkungan, dan promosi energi berkelanjutan;
  - c. Tabungan lapisan ozon dengan mengimplementasikan *Protokol Montreal*.
4. Pencegahan Krisis dan Pemulihan, Indonesia adalah salah satu negara yang paling rawan bencana di dunia. Bencana alam mengancam pembangunan manusia dan merongrong pencapaian *Millenium Development Goals*. Konflik Sosial juga merupakan hambatan serius pembangunan. Oleh karena itu UNDP memberikan prioritas utama untuk mendukung pencegahan krisis dan upaya pemulihan di Indonesia. Tiga prioritas utama:
- a. Pembangunan perdamaian melalui promosi pemerintahan lokal yang baik, pemberdayaan masyarakat, dan kesempatan ekonomi;

- b. Mitigasi bencana dan pengurangan risiko; dan
- c. Pemulihan bencana, masyarakat kembali pada kaki mereka dan membangun kembali kapasitas pemerintahan daerah setelah terkena bencana.

### 2.3 *Millenium Development Goals (MDGs)*

MDGs adalah kesepakatan para pemimpin dunia pada tahun 2000 dan ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2015. MDGs menyediakan kerangka kerja bagi seluruh masyarakat internasional untuk bekerja bersama-sama menuju akhir yang universal dan memastikan bahwa pembangunan manusia dapat dicapai setiap orang / negara. Jika tujuan ini tercapai, kemiskinan dunia akan dipangkas setengah, puluhan jutaan nyawa akan diselamatkan, dan miliaran orang akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari ekonomi global. Termasuk didalamnya adalah tujuan dan sasaran pada kemiskinan pendapatan, kelaparan, angka kematian ibu dan anak, penyakit, tempat tinggal yang tidak memadai, ketidaksetaraan gender, kerusakan lingkungan dan Kemitraan Global untuk Pembangunan.

Target-target tersebut disusun dalam tujuan pembangunan millennium pertama kali dalam konferensi tingkat Tinggi PBB di tahun 1990-an. Hasil-hasil tersebut kemudian di kompilasikan dan kemudian dikenal sebagai Tujuan Pembangunan Internasional (*International Development Goals*). Pada bulan September 2000, 189 pemerintahan negara-negara anggota PBB, termasuk Indonesia menandatangani deklarasi milenium (*The Millennium Declaration*) pada KTT Milenium. Tantangan utama yang dibahas adalah mengarahkan globalisasi menjadi "inklusif dan setara".

Inti dari deklarasi millennium ini adalah 8 tujuan pembangunan millennium seperti telah disebutkan diatas. Diluar ke-8 tujuan tersebut, deklarasi millennium juga membahas isu-isu penting lainnya seperti perdamaian, keamanan dan pelucutan senjata, HAM, demokrasi dan ketatapemerintahan yang baik, kebutuhan khusus bagi Afrika dan penguatan kelembagaan PBB. Nilai-nilai yang mendasari deklarasi millennium adalah: kebebasan, kesetaraan, solidaritas, toleransi, penghargaan terhadap alam dan pertanggungjawaban bersama. Tujuan Pembangunan Milenium kemudian dimatangkan lagi dalam pertemuan tingkat tinggi delapan Negara maju (G8) di Evian, Prancis pada akhir 2003.

Tujuan Pembangunan Milenium adalah komitmen dari komunitas internasional terhadap pengembangan visi mengenai pembangunan; yang secara kuat mempromosikan pembangunan manusia sebagai kunci untuk mencapai pengembangan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan dengan menciptakan dan mengembangkan kerjasama dan kemitraan global.

Krisis ekonomi global mengancam dan mengacaukan kemajuan masa depan yang lebih baik bagi orang-orang di dunia, yang paling rentan bisa jatuh korban kontraksi perdagangan, kiriman uang, arus modal dan dukungan donor. Investasi dalam pembangunan lebih penting dari sebelumnya untuk menjamin stabilitas sosial, keamanan dan kemakmuran, negara-negara donor dipanggil untuk memperbarui daripada mencabut komitmen mereka untuk mencapai MDGs.

MDGs mendorong pemerintah, lembaga donor dan organisasi masyarakat sipil di manapun untuk mengorientasikan kembali kerja-kerja mereka untuk mencapai target-target pembangunan yang spesifik, ada tenggat waktu dan terukur ke

dalam 8 tujuan pembangunan milenium yaitu:

1. **Menghapuskan tingkat kemiskinan dan kelaparan**, Target untuk 2015 :  
Mengurangi setengah dari penduduk dunia yang berpenghasilan kurang dari 1 US\$ sehari dan mengalami kelaparan.
2. **Mencapai Pendidikan Dasar secara Universal**, Target 2015:  
Memastikan bahwa setiap anak laki dan perempuan mendapatkan dan menyelesaikan tahap pendidikan dasar.
3. **Mendorong kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan**, Target 2005 dan 2015:  
Mengurangi perbedaan dan diskriminasi gender dalam pendidikan dasar dan menengah terutama untuk tahun 2005 dan untuk semua tingkatan pada tahun 2015.
4. **Mengurangi tingkat kematian anak**, Target 2015:  
Mengurangi tingkat kematian anak-anak usia di bawah 5 tahun hingga dua-pertiga
5. **Meningkatkan Kesehatan Ibu**, Target 2015:  
Mengurangi rasio kematian ibu hingga 75% dalam proses melahirkan
6. **Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya**, Target 2015:  
Menghentikan dan memulai pencegahan penyebaran HIV/AIDS dan gejala malaria dan penyakit berat lainnya.
7. **Menjamin keberkelanjutan lingkungan**, Target:  
  - a) Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dalam kebijakan setiap negara dan program serta

- merehabilitasi sumber daya lingkungan yang hilang
- b) Pada tahun 2015 mendatang diharapkan jumlah orang yang tidak memiliki akses air minum yang layak dikonsumsi berkurang setengahnya
- c) Pada tahun 2020 mendatang diharapkan dapat mencapai perbaikan kehidupan yang signifikan bagi sedikitnya 100 juta orang yang tinggal di daerah kumuh

### 8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan

Target:

- a) Mengembangkan lebih jauh lagi perdagangan terbuka dan sistem keuangan yang melibatkan komitmen terhadap pengaturan manajemen yang jujur dan bersih, pembangunan dan pengurangan tingkat kemiskinan secara nasional dan internasional.
- b) Membantu kebutuhan-kebutuhan khusus negara-negara tertinggal, dan kebutuhan khusus dari negara-negara terpencil dan kepulauan-kepulauan kecil.
- c) Secara komprehensif mengusahakan persetujuan mengenai masalah utang negara-negara berkembang.
- d) Mengembangkan usaha produktif yang baik dijalankan untuk kaum muda

### 3. Pembahasan

Semua organisasi internasional memiliki struktur organisasi untuk mencapai tujuannya. Apabila struktur-struktur tersebut telah menjalankan fungsinya, maka organisasi tersebut telah

menjalankan peranan tertentu. Dengan demikian, peranan dapat dianggap sebagai fungsi baru dalam rangka pengejaran tujuan-tujuan kemasyarakatan.<sup>5</sup>

Sejajar dengan negara, organisasi internasional dapat melakukan dan memiliki sejumlah peranan penting, yaitu:

- 1) Menyediakan sarana kerjasama diantara negara-negara dalam berbagai bidang, dimana kerjasama tersebut memberikan keuntungan bagi sebagian besar ataupun keseluruhan anggotanya. Selain sebagai tempat dimana keputusan tentang kerjasama dibuat juga menyediakan perangkat administratif untuk menerjemahkan keputusan tersebut menjadi tindakan.
- 2) Menyediakan berbagai jalur komunikasi antar pemerintah negara-negara, sehingga dapat dieksplorasi dan akan mempermudah aksesnya apabila timbul masalah (Bennet, 1995: 3).<sup>6</sup>

Sebagai sebuah organisasi internasional, UNDP juga memiliki peranan yang sangat penting bagi negara-negara anggotanya. Hal ini dibuktikan dengan beberapa upaya mereka dalam membantu setiap negara yang masih ketinggalan dalam mewujudkan MDGs. Di tingkat nasional, UNDP bekerjasama dengan organisasi-organisasi PBB untuk:

- a. Meningkatkan kesadaran dan advokasi MDGs bagi negara-negaraan daerah-daerah untuk mengadopsi dan mengadaptasi MDGs;
- b. Memberikan kepemimpinan dan koordinasi PBB untuk meningkatkan kapasitas negara untuk

<sup>5</sup>jbptunikompp-gdl-adangsutri-22714-10-13.bab-i.pdf, diakses pada 19 Juni 2012

<sup>6</sup>Ibid.,

- menilaiapa yang dibutuhkan dalam mencapai MDGs, untuk konsep kebijakan serta merancang strategi dan rencana. Untuk tujuan ini, UNDP menyelenggarakan konsultasi dan pelatihan, melakukan penelitian, mengembangkan perencanaan dan informasi alat-alat manajemen;
- c. Menyediakan bantuan kepada negara-negara untuk meningkatkan pelaksanaan dalam upaya untuk mencapai MDGs, di daerah seperti pengadaan sumber daya manusia dan manajemen keuangan;
  - d. Membantu negara-negara untuk melaporkan kemajuan mereka.<sup>7</sup>

UNDP, sebagai bagian dari jaringan PBB, menjadi penghubung dan mengkoordinasikan berbagai upaya-upaya di tingkat nasional dan global untuk mencapai MDGs. Sekretaris Jendral PBB Kofi Annan (saat itu) telah meminta administrator UNDP Mark Malloch Brown (direktur dari kelompok-kelompok pembangunan PBB - UN Development Group) untuk menjadi koordinator MDGs. Ada 4 strategi utama UNDP untuk mencapai MDGs yaitu:

1. Mengintegrasikan MDGs ke dalam berbagai aspek dari kerja-kerja badan PBB di tingkat negara, termasuk menciptakan panduan baru untuk menilai dan menyusun pembangunan satu negara.
2. Mendampingi negara-negara berkembang didalam menyiapkan laporan MDGs yang

- menggambarkan perkembangan dalam mencapai tujuan tersebut bekerjasama dengan badan-badan PBB, Bank Dunia, IMF, ornop dan pihak-pihak yang relevan lainnya.
3. Mendukung proyek milenium (Millennium Project) yang diketuai oleh Professor Jeffrey Sachs dari Universitas Columbia dan juga kampanye millennium (Millennium campaign) untuk membangun dukungan publik terhadap MDGs.
  4. Mendukung upaya-upaya advokasi berdasarkan strategi negara dan kebutuhan setiap negara. Negara-negara maju akan difokuskan kepada perdagangan, dana, teknologi untuk mendukung MDGs sementara negara-negara berkembang membangun koalisi untuk aksi dan mendorong pemerintah untuk memprioritaskan dan menggunakan sumber daya secara efektif untuk mendukung pencapaian MDGs.

Ke-8 tujuan pembangunan milenium tersebut telah dievaluasi oleh Majelis Umum PBB (The UN General Assembly) pada tahun 2005. Beberapa organisasi non pemerintah yang berkaitan dengan PBB telah bertemu di kantor pusat PBB di New York pada tanggal 8-10 September 2004 untuk mengetahui bagaimana mereka dapat mendampingi proses ini.

MDGs menyediakan kerangka kerja bagi seluruh sistem PBB untuk bekerja secara koheren bersama menuju akhir yang sama. UNDP, pengembangan jaringan global di 166 negara, berada dalam posisi unik untuk melakukan advokasi untuk perubahan, negara-negara menyambung ke pengetahuan dan sumber daya, dan mengkoordinasikan upaya-upaya yang lebih luas di tingkat negara.

- a. Pertama kampanye mobilisasi - **advokasi** & mendukung, untuk MDGs dan bekerja dengan para mitra untuk memobilisasi komitmen dan kemampuan segmen masyarakat yang luas untuk

<sup>7</sup> MDGs Strategies, UNDP, [http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/povertyreduction/focus\\_areas/focus\\_mdg\\_strategies/](http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/povertyreduction/focus_areas/focus_mdg_strategies/), diakses pada 19 Juni 2012



membangun kesadaran mengenai MDGs.

- b. Kedua, analisis - meneliti dan berbagi **strategi** terbaik untuk memenuhi MDGs dalam hal praktek inovatif, kebijakan dan reformasi kelembagaan, sarana implementasi kebijakan, dan evaluasi pilihan pembiayaan.
- c. Ketiga, pemantauan - membantu negara-negara laporan kemajuan menuju MDGs dan **melacak kemajuan**.
- d. Keempat, kegiatan operasional mendukung dan mendorong pemerintah untuk menyesuaikan MDGs dengan keadaan dan **tantangan** lokal **sebagai** kunci untuk kemajuan MDGs.

UNDP mendukung MDGs berbasis strategi pembangunan nasional Sistem PBB membantu negara-negara meningkatkan kapasitas mereka untuk mencapai Millenium Development Goals (MDGs). Untuk mendukung upaya ini, UNDP dan Proyek Milenium telah merancang satu set layanan yang komprehensif untuk mendukung MDG berbasis strategi pembangunan nasional. Fokus layanan ini pada tiga pilar:

- a. MDGs berbasis diagnostik dan perencanaan investasi (teknis dan bantuan keuangan yang diperlukan untuk mencapai MDGs dalam jangka panjang);
- b. Memperluas pilihan kebijakan dan pilihan (lintas sektoral dan reformasi kebijakan sektoral dan kerangka kerja yang dibutuhkan untuk mempercepat pertumbuhan dengan ekuitas dan mempromosikan pembangunan jangka-panjang manusia); dan
- c. Penguatan kapasitas nasional (memungkinkan pengiriman layanan efektif pada tingkat nasional dan lokal).

## 1.1 Kemitraan

Kemitraan sangat penting untuk pekerjaan UNDP dan untuk mencapai MDGs. mitra UNDP mencakup pemerintah, badan PBB lainnya, lembaga keuangan internasional, badan-badan bilateral, sektor swasta dan masyarakat sipil. Di seluruh negara dan wilayah, UNDP sebagai pengembangan jaringan global PBB, menggunakan keberadaan globalnya untuk membawa bersama mitra dari berbagai latar belakang berbagi keahlian, memulai usaha patungan dan mengembangkan solusi jangka panjang.

Kemitraan adalah upaya membangun koalisi dari seluruh lapisan masyarakat indonesia untuk membangun pembaruan tata pemerintahan. Secara umum program ini ditujukan untuk :

1. Mendorong terjadinya perbaikan tata pemerintahan dengan meningkatkan akuntabilitas, keterbukaan, keteraturan, penghargaan terhadap nilai-nilai etika, dan pemisahan antara kebutuhan pribadi dan kepentingan umum.
2. Mendorong terjadinya konsensus didalam masyarakat.

Ketiga lembaga donor melakukan pembagian kerja sebagai berikut :

1. World Bank bertanggung jawab terhadap program pembaruan sistem peradilan dengan mendukung upaya pemerintah mengembangkan strategi pembaruan sistem hukum dan peradilan secara menyeluruh. Pembaruan sistem kepegawaian dan pelayanan masyarakat melalui pengembangan aparatus negara yang bersih, efisien dan terjangkau.
2. UNDP, bertanggungjawab terhadap program-program ; sistem pengelolaan pemilu, mendukung proses pembaruan sistem pemilu dan peningkatan efisiensi serta integritas pengelolaannya;

pemberdayaan legislatif, mendukung pengembangan badan legislatif nasional yang mampu mewakili kepentingan masyarakat, membuat UU dan mengawasi eksekutif; penguatan masyarakat sipil dan media, mendukung pengembangan masyarakat sipil dan media yang kompeten, dikelola dengan baik dan mandiri.

3. ADB, bertanggungjawab untuk program tata pengaturan dunia usaha; mendukung dikembangkannya tata peraturan dunia usaha yang baik di sektor profesi, industri dan perdagangan.

Struktur kemitraan terdiri atas fasilitas dialog dan analisis serta dana bagi tata pemerintahan Indonesia. Program fasilitas mendukung dialog nasional, pembaruan tata pemerintahan, mempublikasikan kegiatan-kegiatan terbaik yang sedang dilakukan dan mengeluarkan penilaian atas status pemerintahan dan tinjauan terhadap tata pemerintahan. Cakupan program fasilitas penelitian mengorganisir event-event dialog, berbagi informasi dan membangun clearing.house untuk prakarsa-prakarsa pembaruan tata pemerintahan.

Dalam rangka mencapai target-target tersebut tepat pada waktunya, UNDP JUGA melakukan lokalisasi MDGs. Lokalisasi MDGs memungkinkan pemerintah lokal untuk tetap memberi tahu pemerintah nasional mengenai kebutuhan khusus daerah atau sekitarnya. Di negara berpendapatan menengah, lokalisasi MDGs membantu menarik perhatian penduduk yang mengalami kemiskinan, sehingga pelayanan dasar dapat ditingkatkan di daerah yang diidentifikasi tertinggal.<sup>8</sup>

UNDP juga melakukan kerjasama dengan mitra-mitranya seperti Netherlands

Development Organisation (SNV), UN-Habitat and United Nations Capital Development Fund (UNCDF), untuk meningkatkan kesadaran MDGs di tingkat masyarakat. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan organisasi lain yang terkait dalam rangka mewujudkan MDGs berbasis pada perencanaan lokal. Fokus UNDP adalah pada suara-suara yang berasal dari masyarakat pinggiran untuk kemudian disampaikan pada pemerintah daerah untuk kemudian dapat merumuskan, melaksanakan, serta memantau pelaksanaan dari MDGs tersebut.

UNDP bekerja dengan para mitranya untuk mendukung pemerintah melalui empat langkah menyiapkan strategi pembangunan MDGs berbasis nasional:

1. Meluncurkan proses perencanaan inklusif;
2. Mengambil persediaan: meninjau strategi yang ada dan menentukan baseline;
3. Melakukan, penilaian jangka panjang secara rinci - atau kebutuhan MDG - untuk memperkirakan infrastruktur, sumber daya manusia, dan persyaratan keuangan yang dibutuhkan untuk mencapai MDGs;
4. Mengembangkan gambaran strategi pendek sampai jangka menengah pada kebutuhan penilaian MDG nasional.<sup>9</sup>

Atas permintaan negara-negara berkembang, UNDP juga

---

<sup>9</sup>MDGs based on national planning, UNDP, [http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/povertyreduction/focus\\_areas/focus\\_mdg\\_strategies/mdg-based\\_nationalplanning/](http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/povertyreduction/focus_areas/focus_mdg_strategies/mdg-based_nationalplanning/), diakses pada 19 Juni 2012

---

<sup>8</sup>Ibid.,

menawarkan program pelatihan bagi pejabat pemerintah pada MDGs berbasis strategi pembangunan nasional.

## 1.2 Hambatan yang Dihadapi UNDP dalam Mencapai MDGs

Dalam pelaksanaan upaya pencapaian MDGs, UNDP tidak selalu mengalami kemudahan, terkadang terdapat beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi UNDP tersebut. Hambatan-hambatan tersebut adalah ketidaksamaan pencapaian MDGs di tiap negara di dunia. Pada upaya pencapaian tersebut, ada beberapa negara di dunia khususnya negara miskin dan berkembang bahkan tidak mengalami kemajuan signifikan dengan adanya MDGs ini.

Walaupun banyak pemimpin dunia yang melihat kemajuan, namun tidak sedikit pula yang menyaksikan kemunduran. Banyak yang melihat kegagalan tersebut karena faktor kesalahan pendekatan dari Negara itu sendiri, sementara lainnya melihat kegagalan karena faktor eksternal atau campur tangan dari luar. Pemimpin Negara maju, seperti Jerman dan Inggris, telah menyebarkan optimisme bahwa tujuan MDGs akan tercapai seperti rencana semula, asalkan para pemimpin Negara berkembang bersedia menciptakan pemerintahan yang baik dan menjalankan pembangunan ekonomi secara konsisten.

Namun, suara dari Negara-negara dunia ketiga, khususnya yang paling menderita akibat konflik dan blockade dari negeri maju, menganggap bahwa proyek MDGs akan "sulit tercapai". Namun, alih-alih mengurangi kemiskinan dan kelaparan di berbagai belahan dunia, fakta justru memperlihatkan bahwa jumlah kelaparan di dunia telah meningkat dari 842 juta jiwa

pada tahun 1990 menjadi lebih dari 1 milyar tahun ini.<sup>10</sup>

Dari beberapa pernyataan diatas dapat dilihat adanya ketidaksamaan pengertian terkait dengan pelaksanaan MDGs ini. Negara-negara maju sangat optimis dengan adanya MDGs ini sedangkan negara-negara berkembang melihat dengan pesimis pelaksanaan dari MDGs di dunia.

## 2. Kesimpulan

UNDP merupakan salah satu organisasi internasional yang aktif membantu negara-negara dalam mencapai Millenium Development Goals 2015. MDGs merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh PBB untuk mengatasi krisis multidimensi yang tengah dialami oleh dunia. Namun, dalam pelaksanaan MDGs, UNDP mendapati adanya ketidaksamaan pengertian antara negara maju dan negara berkembang.

### Daftar Pustaka

- Baylis, John and Steve Smith. 2001. *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*. 2nd ed. New York: Oxford University Press.
- Jack C. Plano dan Roy Olton. 1999. *Kamus Hubungan Internasional*. Bandung: Abardin
- Clive Archer, *International organization*, George Allen and Unwin,, London, 1983.
- George Scott, *Role Theory in the Social Sciences*, London, Sage Publication, 2005,
- K.J Holsti. *Politik Internasional Suatu Kerangka Pemikiran Analisis*.

---

<sup>10</sup>*Ibid.*,

Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1990

“*Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs)*”, Statistics Solution, 01 Januari 2012, <http://faharuddin.wordpress.com/2012/01/01/tujuan-pembangunan-milenium-mdgs/>, diakses pada 16 Juni 2012

“*What they are?*”, Millenium Project, <http://www.unmillenniumproject.org/goals/index.htm>, dikases pada 19 Juni 2012

*MDGs Strategies, UNDP*, [http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/povertyreduction/focus\\_areas/focus\\_mdg\\_strategies/](http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/povertyreduction/focus_areas/focus_mdg_strategies/), diakses pada 19 Juni 2012

*MDGs Localization, UNDP*, [http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/povertyreduction/focus\\_areas/focus\\_mdg\\_strategies/mdg\\_localization/](http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/povertyreduction/focus_areas/focus_mdg_strategies/mdg_localization/), diakses pada 19 Juni 2012

*MDGs based on national palanning, UNDP*, [http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/povertyreduction/focus\\_areas/focus\\_mdg\\_strategies/mdg-based\\_nationalplanning/](http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/povertyreduction/focus_areas/focus_mdg_strategies/mdg-based_nationalplanning/), diakses pada 19 Juni 2012